



PEMBERIAN KETERANGAN AHLI

Pada Selasa, tanggal 3 Maret 2015, bertempat di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan, Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) Perwakilan Provinsi Sumatera Utara kembali memenuhi permintaan pemberian keterangan ahli dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi terkait Dana Jampersal pada Dinas Kesehatan Pemerintah Kabupaten Langkat Tahun Anggaran 2013 atas nama terdakwa dr. Gunawan dkk. Hadir sebagai Ahli dalam persidangan ini adalah pemeriksa dari BPK RI Perwakilan Sumatera Utara, **Yulita Prihati Hartanti, S.E.** yang didampingi oleh Subbag Hukum BPK Perwakilan Sumatera Utara.



Dalam sidang selain menjawab pertanyaan dari Majelis Hakim, Jaksa Penuntut umum dan Penasehat Hukum. Ahli juga menjelaskan secara komprehensif mengenai pendapatnya terkait permasalahan yang terjadi pada kasus tersebut, pada sidang yang dimulai pukul 15.00 WIB tersebut, Ahli menjelaskan tentang jenis pemeriksaan yang ada di BPK dan mekanisme pemeriksaan atas dana Jampersal pada Dinas Kesehatan Pemerintah Kabupaten Langkat Tahun Anggaran 2013 sesuai dengan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Langkat Tahun Anggaran 2013.

23 LKPD TAHUN ANGGARAN 2014 TELAH DITERIMA BPK PERWAKILAN PROVINSI SUMATERA UTARA SECARA TEPAT WAKTU



Sampai dengan waktu yang ditetapkan Peraturan Perundang-undangan, Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) Perwakilan Provinsi Sumatera Utara telah menerima 23 Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2014 dari Pemerintah Daerah (Pemda) di Sumatera Utara untuk dilakukan audit BPK. Adapun pemda yang menjadi entitas BPK RI Perwakilan Provinsi Sumatera Utara secara keseluruhan meliputi 33 pemerintah kota/pemerintah kabupaten dan 1 pemerintah provinsi Sumatera Utara. Penyerahan Laporan Keuangan tersebut dibuka pertama kali oleh Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai yang menyerahkan LK Pemerintah Daerah Kabupaten Serdang Bedagai menyerahkan Laporan Keuangan kepada BPK RI Perwakilan Provinsi Sumatera Utara pada 9 Maret 2015. Selanjutnya diikuti berturut-turut oleh Kabupaten Nias (10 Maret 2015), Provinsi Sumatera Utara (19 Maret 2015), Kabupaten Tapanuli Selatan (20 Maret 2015), Kabupaten Tapanuli Utara (23 Maret 2015), Kabupaten Karo (23 Maret 2015), Kabupaten Batubara (23 Maret 2015), Kabupaten Humbang Hasundutan (24 Maret 2015), Kabupaten Labuhanbatu (26 Maret 2015), Kabupaten Pakpak Bharat (21 Maret 2015), Kabupaten Samosir (26 Maret 2015), Kota Pematangsiantar (26 Maret 2015), Kabupaten Simalungun (26 Maret 2015), Kota Gunungsitoli (27 Maret 2015), Kabupaten Tapanuli Tengah (30 Maret 2015), Kota Binjai (30 Maret 2015), Padangsidimpuan (30 Maret 2015), Langkat (30 Maret 2015), Medan (30 Maret 2015). Sedangkan pada 31 Maret 2015 terdapat empat LKPD yang diserahkan, yaitu berturut-turut Kabupaten Asahan, Kabupaten Deli Serdang, Kabupaten Dairi dan ditutup oleh Kabupaten Mandailing Natal. Atas penyerahan Laporan Keuangan tersebut, BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Utara menindaklanjutinya dengan segera mengirimkan tim pemeriksaan untuk bertugas di lapangan. BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Utara mengharapkan kerjasama pihak pemda untuk membantu menyediakan data yang diperlukan untuk kegiatan pemeriksaan, agar pemeriksaan dapat berjalan dengan lancar.



BPK PERWAKILAN PROVINSI SUMATERA UTARA TERIMA LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH



Penyerahan LK Pemkab Serdang Bedagai



Penyerahan LK Pemkab Padangsidimpuan



Penyerahan LK Pemkab Tapanuli Utara

DAFTAR ISI	
Date	Subject
2015	MARET
HALAMAN 1	23 LKPD Diterima Tepat Waktu
HALAMAN 2	Galeri kegiatan
HALAMAN 3	Ekspose Kejaksaaan Tinggi Sumatera Utara
HALAMAN 4	Pemberian Keterangan Ahli

REDAKSI

Iskandar Setiawan,
Venny, Awie Pramayudha, Teguh Iman S., Nur Aisyah
Ahmad Nur, Darma Hasibuan

ALAMAT REDAKSI :
BPK RI Perwakilan Provinsi Sumatera Utara, Jl. Imam Bonjol No.22 Medan
Telp. 061-4519039

klik.....

www.medan.bpk.go.id
untuk mengunduh
versi digital
Buletin Sekilas Warta BPK